

**Analisa Implementasi Basis AkruaI Pada Laporan Keuangan
Berbasis Kas Modifikasi Pada Pusat Penelitian
Limnologi-LIPI
Oleh: M. Imam Sundarta dan Ester Rosita**

Abstract

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisa Laporan Keuangan Pusat Penelitian Limnologi-LIPI Tahun Anggaran 2012 dalam hal penyajian akun-akun akrual yang meliputi kas, piutang, persediaan, aset tetap dan kewajiban selama menggunakan basis Kas Modifikasi. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan cara melakukan penelitian atas Laporan Keuangan dan pengumpulan data dan informasi terkait, yang diharapkan adanya perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Puslit Limnologi-LIPI. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akrual masih dirasakan sulit terbukti dengan adanya beberapa penyajian pos-pos akrual yang belum diterapkan dengan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang akrual. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan bahwa dalam penerapan akrual dibutuhkan upaya yang keras dan kerjasama dari semua pihak.

Keywords: Basis akrual, basis kas modifikasi, pos akrual, laporan keuangan, Puslit Limnologi-LIPI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Secara luas, akuntansi dikenal sebagai bahasa bisnis yang bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi, para pengambil keputusan, dan yang berkepentingan lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 yang dimaksud dengan akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkualitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut menjadi sebuah alat pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagi instansi pemerintah, Laporan Keuangan adalah untuk menggambarkan pertanggungjawaban instansi atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas sebuah laporan keuangan instansi pemerintah sangat penting karena dapat dikatakan berperan sebagai media akuntabilitas, yang memberikan informasi yang transparan dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akun tabilitas sebuah laporan keuangan tentunya berhubungan dengan basis penyusunan laporan keuangan. Secara umum terdapat dua basis pencatatan akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual. Akuntansi basis kasa adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi-transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam

laporan keuangan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi-transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan padasaat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai terjadinya sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh sumber daya dicatat. Penggunaan basis kas pada sektor pemerintahan lebih sering digunakan dengan pertimbangan lebih mudah. Sementara penggunaan basis akrual masih menjadi perdebatan, sehingga keunggulan akrual yang dapat mencerminkan konsumsi sumber daya dengan lebih tepat, kurang dapat dimanfaatkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan jumlah penduduk relatif besar mulai melakukan pembenahan dalam sistem pemerintahan. Rakyat Indonesia diberikan hak untuk mengemukakan pendapat dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah untuk itu diperlukan keterbukaan dalam pertanggungjawaban yang mengharuskan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.

Terkait dengan upaya untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi di bidang keuangan. Selama beberapa dekade Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya. Upaya ini mendapat momentum dengan adanya reformasi keuangan negara dipenghujung tahun 1990-an berupa diterbitkannya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Reformasi di bidang akuntansi tersebut salah satunya yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi basis akrual pada setiap instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 13, 14,15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5(lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pada tahun 2005, Presiden SBY menetapkan Peraturan Pemerintah No.24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mulai diberlakukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksana APBN/APBD tahun anggaran 2005. Berdasarkan PP tersebut akuntansi pemerintah menggunakan akuntansi berbasis Kas Modifikasi (cash basis toward accrual) artinya penggunaan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual pada Neraca untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Reformasi keuangan yang terjadi di Indonesia dilakukan secara bertahap tersebut dilakukan mengingat bahwa masih terdapat beberapa faktor hambatan dan kendala dalam penggunaan basis akrual. Basis kas Modifikasi atau Cash Toward Accrual (CTA) sebagai metode penyusunan laporan keuangan pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan basis kas yang dimodifikasi dengan beberapa sistem pencatatan akrual yang merupakan tahap awal. Dengan adanya sistem baru yaitu CTA, maka sistem tersebut menggantikan laporan keuangan berbasis kas yang telah dipraktikkan sejak zaman kolonial.

Basis CTA ini kurang mendapat dukungan, hal tersebut karena pencatatan untuk transaksi-transaksi besar pemerintah seperti pendapatan dan belanja yang muncul dalam Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan basis kas. Teknik pencatatan basis CTA yang bersifat setengah kas dan setengah akrual menjadikan para entitas pelapor keuangan tidak termotivasi untuk belajar mengadopsi sistem akrual secara keseluruhan, padahal seharusnya organisasi pemerintah sudah mulai melakukan pencatatan yang bersifat akrual. Akibatnya akan terdapat kemungkinan pos-pos akrual dineraca tidak tercatat dengan semestinya. Terlepas dari hal-hal yang merupakan kelemahan dari basis CTA, sisi positif yang diberikan dari basis ini adalah bahwa paling tidak sudah dapat menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan pemerintah berupa neraca yang memperlihatkan sumber daya pemerintah yang tersedia. Perkembangan terakhir ketentuan penggunaan akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 tahun 2010 bahwa pemerintah Indonesia sudah harus menggunakan basis akrual secara penuh pada tahun 2015.

Pusat Penelitian Limnologi-LIPI merupakan Instansi Pemerintah Pusat berdasarkan keputusan kepala LIPI No. : 1151/M/2001 tanggal 5 Juni 2001 bertugas melaksanakan penelitian dan penyiapan kebijakan, penyusunan pedoman, pembinaan bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan penelitian bidang Limnologi serta evaluasi dan penyusunan laporan. Pusat Penelitian Limnologi-LIPI adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Pusat Penelitian Limnologi-LIPI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Penelitian Limnologi-LIPI, umumnya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Keuangan Pusat Penelitian Limnologi-LIPI pada saat ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan meliputi : Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur unsur pendapatan dan belanja selama 1 periode ; Neraca yaitu suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana; dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan tersebut.

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintah dari basis kas menjadi basis akrual yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih

akuntabel, memerlukan upaya dan usaha yang keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada Puslit Limnologi-LIPI, penerapan akrual masih dirasakan sulit, terbukti sering adanya perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan bahkan menjadi temuan, sementara itu sesuai PP Nomor 71 tahun 2010 bahwa pemerintah Indonesia sudah harus menggunakan basis akrual secara penuh pada tahun 2015. Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan mengangkat tema ANALISA IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS MODIFIKASI PADA PUSAT PENELITIAN LIMNOLOGI-LIPI (STUDI KASUS) dengan meneliti tentang penerapan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pusat Penelitian Limnologi LIPI tahun 2012 dalam hal penyajian pos-pos akrual sehingga mampu memberikan informasi yang relevan.

Pembahasan akan menjelaskan beberapa dampak penerapan basis Kas Modifikasi/CTA baik dari sisi konseptual teori maupun aplikasi dalam praktik dan basis akrual yang agak rumit yang menarik untuk dikaji, diaplikasikan dan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dalam mengaplikasikan basis akuntansi akrual secara penuh.

2. Permasalahan

Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;

2.1 Untuk Melihat penerapan basis akrual dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Puslit Limnologi-LIPI pada Basis Kas Modifikasi/CTA terkait dengan penyajian kas, persediaan, piutang, aset tetap, dan kewajiban.

2.2. Untuk melihat dampak dalam penerapan Basis Kas Modifikasi/CTA sebagai basis akuntansi pemerintah.

2.3. Untuk melihat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi penerapan basis akrual penuh

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

3.2. Hasil penelitian ini agar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelaporan keuangan Puslit Limnologi-LIPI dengan Basis Cash Toward Accrual (CTA) dan dapat memberi masukan dari evaluasi penerapan basis yang digunakan selama ini sehingga menambah kesiapan untuk melakukan adopsi penuh atas basis akrual pada tahun 2015.

3.3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran tentang beberapa basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Prof. Abu Bakar dalam buku Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (2013:7), menjelaskan bahwa metode penelitian Deskriptif adalah metode yang melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Penelitian dilakukan dengan

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Penelitian deskriptif ini lebih bersifat analisis terhadap penerapan SAP pada Laporan Keuangan Pusat Penelitian Limnologi-LIPI periode 2012 dengan tujuan mengetahui aplikasi dan konsep-konsep akrual pada Basis Kas Modifikasi/CTA yang diharapkan akan timbulnya beberapa perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan dan agar siap untuk menerapkan basis akrual secara penuh di tahun 2015.

Adapun unsur dalam metode penelitian mencakup :

1. Variabel dan Pengukurannya :

Objek penelitian skripsi ini adalah Pusat Penelitian Limnologi-LIPI terkait dengan penyusunan laporan keuangan untuk periode 2012. Variabel dan pengukurannya antara lain :

- a. Kas adalah bagian dari aset lancar yang paling liquid diantara aset lainnya. Pengukuran terkait kas ini akan menganalisa penyajian dan sistem pengelolaan kas di Kantor Pusat penelitian Limnologi-LIPI mengenai kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Analisis ini juga akan menghubungkan dengan beberapa pos akrual lainnya seperti Ekuitas Dana Lancar-SILPA dan Kewajiban Jangka Pendek.
- b. Piutang adalah bagian dari aset lancar yang menjadi sorotan auditor berkaitan dengan PNBPN. Pengukuran terkait piutang ini akan menganalisa apakah ada jasa yang belum dibayar atau tidak tersaji dalam neraca.
- c. Persediaan adalah salah satu bagian aset lancar yang digunakan dalam kegiatan operasional. Pengukuran dilakukan dengan menganalisa penyajian saldo persediaan apakah sudah diakui dalam neraca.
- d. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengukuran nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan dan termasuk biaya-biaya yang menyertainya yang berkenaan dengan perolehan aset tetap tersebut.
- e. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah. Pengukuran nilai kewajiban dihitung berdasarkan nilai nominal yang harus dibayarkan pada saat pertama kali transaksi terjadi.

2. Prosedur Penarikan Sampel

Metoda pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif. Prosedur penarikan sampel bertujuan khusus yang terkait dengan Neraca, LRA dan CaLK Pusat Penelitian Limnologi-LIPI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data informasi Instansi yang dibutuhkan untuk dianalisa. Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan melalui beberapa teknik yang meliputi :

- a. Penelitian Perpustakaan (Library Research) : suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mempelajari berbagai teori dari buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan

Menteri Keuangan dan Peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research) : suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan terjun sendiri ke lapangan untuk mengumpulkan data-data, sehingga data yang diperoleh dapat diyakini kebenarannya.

c. Wawancara : suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukannya jawab dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti baik pejabat yang berwenang maupun terhadap pelaksana.

d. Studi Dokumentasi : yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung tetapi melalui dokumen berupa laporan keuangan dari Instansi yang diteliti.

4. Metoda Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis dengan tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik ataupun model lainnya. Analisis data dilakukan terbatas pada pengolahan datanya dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian dilakukan uraian dan penafsiran.

II. PEMBAHASAN

A. Aplikasi Basis Akrual Pada Laporan Berbasis Kas Modifikasi

Implementasi Basis Kas Modifikasi atau Basis Kas Menuju Akrual dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran II PP No. 24 Tahun 2005 yaitu sampai dengan akhir tahun 2014. Selanjutnya setiap entitas pelaporan baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual, walaupun entitas pelaporan tersebut untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Modifikasi/CTA dan diharapkan segera menerapkan SAP basis Akrual. Penyusunan Laporan Keuangan Puslit Limnologi-LIPI pada saat ini menggunakan Basis Kas Modifikasi/CTA artinya menggunakan dua basis yaitu: penggunaan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan penggunaan basis akrual pada Neraca untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Penggunaan basis CTA ini akan berdampak pada Neraca, setelah melalui proses penyesuaian maka akan muncul akun-akun yang diakui sebagai akrual pada Neraca. Proses Penyesuaian akan yang dilaksanakan jika terkait dengan: (1) koreksi kesalahan pencatatan; (2) pencatatan untuk transaksi transaksy yang belum dicatat; (3) transaksi untuk piutang dan persediaan; dan (4) penyusutan aset tetap di akhir periode. Sajian Neraca Puslit Limnologi-LIPI pada periode 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. NERACA

NAMA PERKIRAAN	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0	Rp 0
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0	Rp 0
Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 259.918.350	Rp 10.147.000
Jumlah Kas dan Bank	Rp 259.918.350	Rp 10.147.000
Piutang		
Piutang Bukan Pajak	Rp 0	Rp 0
Jumlah Piutang (Bersih)	Rp 0	Rp 0
Persediaan	Rp 19.512.150	Rp 28.389.650
Jumlah Aset Lancar	Rp 279.430.500	Rp 38.536.650
Aset Tetap		
Tanah	Rp 442.340.000	Rp 442.340.000
Peralatan dan Mesin	Rp 7.373.897.732	Rp 6.844.437.232
Gedung dan Bangunan	Rp 10.624.414.000	Rp 10.624.414.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 205.405.000	Rp 205.405.000
Aset Tetap Lainnya	Rp 248.850.000	Rp 228.952.000
KDP	Rp 0	Rp 0
Jumlah Aset Tetap	Rp 18.894.906.732	Rp 18.345.548.232
Piutang Jangka Panjang		
Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	Rp 0	Rp 0
Aset Lain-Lain	Rp 0	Rp 347.630.000
Jumlah Aset Lainnya	Rp 0	Rp 347.630.000
JUMLAH ASET	Rp 19.174.337.232	Rp 18.731.714.882
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 341.287.459	Rp 0
Uang Muka dari KPPN	Rp 0	Rp 0
Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp 259.918.350	Rp 10.147.000
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 601.205.809	Rp 10.147.000
JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 601.205.809	Rp 10.147.000
EKUITAS DANA		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	Rp 0	Rp 0
Cadangan Persediaan	Rp 19.512.150	Rp 28.389.650
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp (341.287.459)	Rp 0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Rp (321.775.309)	Rp 28.389.650
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp 18.894.906.732	Rp 18.345.548.232
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp 0	Rp 347.630.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	Rp 18.894.906.732	Rp 18.693.178.232
JUMLAH EKUITAS DANA	Rp 18.573.131.423	Rp 18.721.567.882
JMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp 19.174.337.232	Rp 18.731.714.882

Sumber : Puslit Limnologi-LIPI

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi sumber daya yang dimiliki dan informasi darimana sumber daya tersebut. Neraca Puslit Limnologi-LIPI pada tanggal 31 Desember 2012 terdiri dari : (1) Aset sebesar Rp 19.174.337.232,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp279.430.500,00; Aset Tetap sebesar Rp 18.894.906.732,00; Piutang Jangka Panjang Rp 0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp 0,00; (2) Kewajiban sebesar Rp 601.205.809,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek; dan (3) Ekuitas Dana sebesar Rp 18.573.131.423,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar (EDL) sebesar Rp (-321.775.309,00) yang merupakan penjumlahan antara Ekuitas Dana Lancar (EDL) dengan Kewajiban Jangka Pendek dan Ekuitas Dana Investasi (EDI) sebesar Rp 18.894.906.732,00 yang merupakan penjumlahan antara EDL dengan EDI. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Neraca

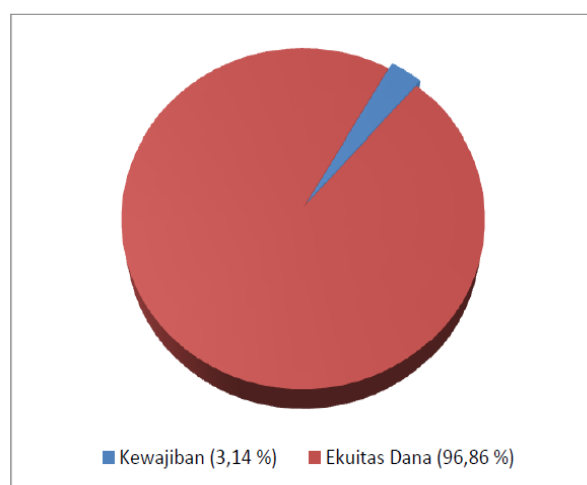
Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ penurunan	%
	31-12-2012	31-12-2011		
Aset				
Aset Lancar	279.430.500	38.536.650	240.893.850	625,10
Aset Tetap	18.894.906.732	18.345.548.232	549.358.500	2,99
Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Aset Lainnya	0	347.630.000	(347.630.000)	(100)
Jumlah Aset	19.174.337.232	18.731.714.882	442.622.350	2,36
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	601.205.809	10.147.000	591.058.809	5.824,96
Ekuitas Dana Lancar	(321.775.309)	28.389.650	(350.164.959)	1.033,42
Ekuitas Dana Investasi	18.894.906.732	18.693.178.232	201.728.500	1,07
Jumlah Ekuitas Dana	18.573.131.423	18.721.567.882	(148.436.459)	(0,79)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	19.174.337.232	18.731.714.882	442.622.350	2,36

Sumber : Puslit Limnologi-LIPI

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, ekonomi masa datang yang diharapkan mengalir ke entitas.

Jumlah Aset sama dengan penambahan Kewajiban dengan Ekuitas. Total Aset Puslit Limnologi-LIPI per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 19.174.337.232,00 sama nilainya dengan penjumlahan antara Kewajiban sebesar Rp 601.205.809,00 dengan Ekuitas sebesar Rp 18.573.131.423,00. Komposisi Kewajiban dan Ekuitas Dana Puslit Limnologi per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Komposisi Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2012



Sumber : Puslit Limnologi-LIPI

B. Analisa Hasil

Pencatatan basis Kas Modifikasi yang bersifat setengah kas dan setengah akrual dalam praktiknya menjadikan para entitas pelapor keuangan tidak termotivasi untuk belajar mengadopsi sistem akrual secara keseluruhan, akibatnya akan ada kemungkinan pos-pos akrual di Neraca yang tidak tercatat atau tercatat dengan nilai yang tidak semestinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka analisa akan dilakukan terhadap akun-akun akrual

seperti kas, Kewajiban (3,14 %) Ekuitas Dana (96,86 %) piutang, persediaan, aset tetap, dan kewajiban.

1. Kas

Kas yang terdapat pada Puslit Limnologi-LIPI adalah uang tunai dan saldo yang ada di bank, tersaji dalam Neraca yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Kas di Bendahara Pengeluaran; (2) Kas di Bendahara Penerimaan; dan (3) Kas Lainnya dan Setara Kas. Rincian Kas pada Puslit Limnologi-LIPI Tahun Anggaran 2008 s.d. 2012 dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Kas TA 2008 - 2012

Kas	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0
Bendahara Penerimaan	0	0	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	10.147.000	259.918.350
Jumlah	0	0	0	10.147.000	259.918.350

Sumber : Puslit Limnologi-LIPI

Tahun anggaran 2008 s.d. 2010 saldo kas di Bendahara Penerimaan dan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0,00. Pada tahun anggaran 2008 s.d 2010, Kas Lainnya dan Setara Kas Puslit Limnologi-LIPI sebesar Rp 0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2012 dan 2011 terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yaitu sebesar Rp 259.918.350,00 dan Rp 10.147.000,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp 259.918.350,00 tersebut berasal dari : (1) Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai tahun 2012 sebesar Rp 249.047.000,00; dan (2) Pengembalian Uang Makan Pegawai bulan Desember 2012 sebesar Rp 10.871.350,00. Kas pada Puslit Limnologi-LIPI yang tersaji dalam dalam Neraca terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Puslit Limnologi- LIPI. Pada saat akhir tahun anggaran saldo kas di Bendahara Pengeluaran harus berjumlah Rp 0,00.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan Puslit Limnologi- LIPI yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat akhir tahun= anggaran, kas di Bendahara Penerimaan harus berjumlah Rp 0,00, karena di Bendahara Penerimaan sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan adanya saldo dalam Neraca yang dilaporkan. Namun apabila terdapat saldo, maka saldo tersebut harus dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- c. Kas Lainnya dan Setara Kas adalah Kas lainnya yang ada pada Bendahara Pengeluaran Puslit Limnologi-LIPI selain kas dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP). Kas Lainnya dan Setara Kas pada pemerintah biasanya berasal dari :
 - 1) Belanja yang tidak terealisasi atau pengembalian belanja;
 - 2) Bunga jasa giro yang belum disetorkan ke kas Negara;
 - 3) Pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara;

- 4) Belanja yang belum dibayarkan kepada yang berhak;
- 5) Penerimaan hibah langsung berupa kas.

Akun Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas yang masih berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran berupa uang yang masih harus dipertanggungjawabkan atau Uang Persediaan (UP) yang harus disetorkan ke Pihak Ketiga ataupun disetorkan kembali ke Kas negara. Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan ataupun disetorkan kepada Kas Negara yang berasal dari Belanja yang tidak terealisasi atau sebagai pengembalian belanja. Berikut kasus yang terjadi :

□ Pada tanggal 26 Desember 2012 diterima Uang Muka Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai tahun 2012 melalui rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 4.347.668.000,00 kemudian pada tanggal 27 Desember 2012 diambil dari bank sebesar uang yang masuk tersebut, kemudian dibayarkan kepada pegawai Puslit Limnologi-LIPI oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan daftar yang dibuat oleh Bagian Kepegawaian Puslit Limnologi-LIPI atas dasar kelas jabatan, tunjangan kinerja dan jumlah persentasi kehadiran pegawai ternyata yang dibayarkan sebesar Rp 4.098.621.000,00. Atas dasar Daftar Perhitungan Tukin tersebut ternyata hanya terserap 94,27%, sehingga masih ada saldo sebesar Rp 249.047.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2012 saldo tersebut belum disetorkan ke Kas Negara.

□ Pada tanggal 10 Desember 2012 terdapat Uang Muka Belanja Uang Makan Pegawai untuk bulan Desember 2012 di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 49.698.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2012 dibayarkan kepada pegawai Puslit Limnologi-LIPI oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan persentasi kehadiran pada bulan Desember 2012 yang dibuat oleh Bagian Kepegawaian Puslit Limnologi-LIPI. Atas dasar persentasi kehadiran tersebut ternyata hanya terserap 78,13%, sehingga masih ada saldo sebesar Rp 10.871.350,00, dan saldo tersebut belum disetorkan ke KUN pada tanggal 31 Desember 2012. Mekanisme pencatatan pada basis CTA terkait dengan akun kas adalah pada bulan Januari s.d. Desember karena menggunakan basis kas, maka ketika ada belanja yang tidak terealisasi, dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara dengan menggunakan formulir penyetoran SSPB. Penyetoran dana tersebut akan mempengaruhi realisasi belanja pada LRA.

Namun ketika di akhir periode karena menggunakan basis akrual, maka ketika ada saldo di Bendahara Pengeluaran yang merupakan pengembalian belanja dan belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2012, saldo tersebut harus diakui dan disajikan dalam Neraca. Agar tersaji di Neraca, maka sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada debet dengan akun penyeimbangannya Pendapatan Yang Ditangguhkan. Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun kas dapat disimpulkan bahwa :

□ Komponen kas di dalam Neraca Puslit Limnologi terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp 249.047.000,00, sudah diakui dan disajikan dalam Neraca sebagai salah satu bagian dari Aset Lancar dengan akun penyeimbangannya yaitu Pendapatan Yang Ditangguhkan yang merupakan bagian dari Kewajiban.

□ Penerapan konsep akrual terkait dengan akun kas dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Puslit Limnologi-LIPI yang berbasis Kas Modifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu : (1) sudah sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pada saat akhir tahun anggaran saldo kas di Bendahara Penerimaan

harus nihil. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja; dan (2) sudah sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pada basisCTA ini masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku, sehingga melalui proses penyesuaian kas sebesar Rp 259.918.350,00 tercatat dan diakui dalam Neraca pada periode 2012. Jurnal penyesuaian untuk pengakuan saldo kas tersebut adalah:

Basis CTA	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	259.918.350	259.918.350
-----------	---	-------------	-------------

2. Piutang

Piutang adalah salah satu akun Neraca yang cukup penting. Di dalam Neraca piutang merupakan bagian dari aset lancar yang paling likuid setelah kas. Piutang Puslit Limnologi-LIPI yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 0,00. Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang dapat timbul karena menjual barang/jasa, dan timbulnya piutang pada saat entitas menyerahkan barang/jasa yang dijual. Berdasarkan hasil analisa berkaitan dengan Piutang dapat dijelaskan bahwa :

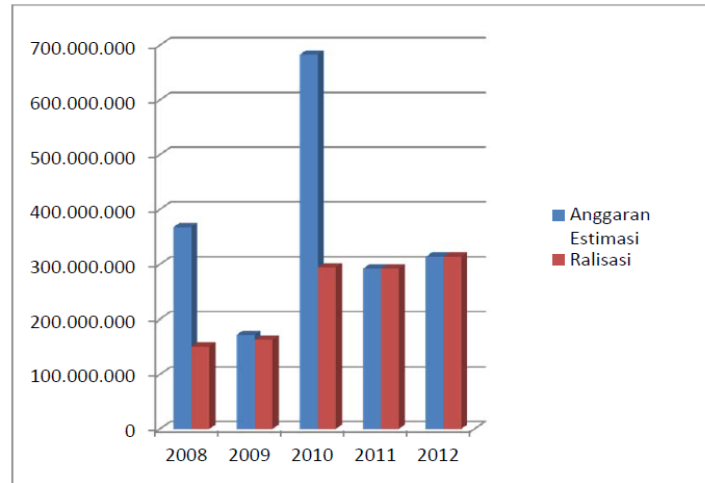
- a. Piutang Puslit Limnologi-LIPI per 31 Desember 2012 dari TPA dan TGR sebesar 0,00, yang mengandung arti tidak ada TGR.
- b. Piutang Puslit Limnologi-LIPI yang berasal dari kerjasama PNBPN yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 0,00, yang mengandung arti tidak ada Jasa yang dikeluarkan Puslit Limnologi-LIPI yang belum dibayar oleh stakeholder. Piutang adalah bagian dari aset lancar yang menggambarkan adanya hak Pemerintah untuk menerima penerimaan berupa kas di Kas Umum Negara (KUN)/Daerah dari Pemerintah Pusat/Daerah, Mitra Kerja, dan pihak ketiga lainnya. Pada tanggal cut off apabila terdapat hak dari pemerintah untuk menagih, maka nilai nominalnya harus dicatat sebagai penambahan aset berupa piutang dalam Neraca. Basis CTA menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh sebab itu, Surat Penagihan (SPN) dan/atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) PNBPN yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar, maka harus dilaporkan sebagai Piutang PNBPN dalam neraca. Piutang PNBPN dicatat sebesar nilai nominal seluruh tagihan yang belum dibayar oleh wajib bayar pada tanggal neraca. Hasil Analisa berkaitan dengan Piutang dapat dijelaskan bahwa Puslit Limnologi-LIPI adalah salah satu Satker yang mengelola PNBPN dari transaksi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi. Realisasi Pendapatan Puslit Limnologi-LIPI tahun 2012 yang berasal dari Penerimaan PNBPN adalah Rp 313.571.252,00 atau mencapai 100% dari Estimasi Pendapatannya yaitu Rp 313.571.252,00. Data Estimasi Penerimaan dan Realisasi PNBPN dari Tahun 2008 s.d. 2012 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 3.

Tabel 7. Estimasi Penerimaan dan Realisasi PNB

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
1.	2012	313.571.252	313.571.252	100%
2.	2011	292.105.000	292.105.000	100%
3.	2010	682.991.000	294.304.000	43,09%
4.	2009	172.452.000	163.513.509	94,82%
5.	2008	367.812.000	151.264.659	41,40%

Sumber : Puslit Limnologi-LIPI

Gambar 3. Realisasi PNB 2008 s.d. 2012



Sumber : Puslit Limnologi-LIPI

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Puslit Limnologi-LIPI Tahun Anggaran 2009, 2011 dan 2012 antara Realisasi dengan Estimasi atau Anggaran adalah relatif sama, ada sedikit perbedaan di tahun 2009 tapi perbedaan tersebut tidak signifikan. Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun Piutang dapat dijelaskan bahwa Piutang sudah tersaji dalam Neraca Puslit Limnologi- LIPI per 31 Desember 2012 dengan nilai Rp 0,00. Berdasarkan hasil penelusuran data dan wawancara dengan petugas terkait ditemukan :

□ Adanya penerimaan PNB dari Pihak Ketiga pada tanggal 28 Februari 2013 sebesar 52.710.000,00 untuk pembayaran termin ketiga kerjasama PNB dan merupakan tagihan untuk periode 2012. Namun karena keterbatasan pemahaman dalam piutang, maka penerimaan tersebut tidak diakui pada periode 2012. Sehingga piutang tersaji di Neraca 2012 dengan nilai yang tidak semestinya. Jika terjadi pada tanggal cut off terdapat hak untuk menagih, maka nilai nominalnya harus dicatat sebagai penambahan aset berupa piutang. Piutang tersaji dalam Neraca dengan akun penyeimbangannya adalah Cadangan Piutang yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (EDL).

3. Persediaan

Persediaan pada Puslit Limnologi-LIPI adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan merupakan barang habis pakai. Persediaan Puslit Limnologi-LIPI pada akhir periode 2012 sebesar Rp 19.512.150,00. Berdasarkan hasil analisa yang berkaitan dengan Persediaan dapat dijelaskan bahwa beberapa kebijakan atas persediaan yang digunakan Puslit Limnologi-

LIPI antara lain : (1) Pengakuan persediaan terjadi pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; (2) Nilai Persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan; dan (3) Penyajian persediaan sebesar biaya perolehan karena diperoleh dengan pembelian. Saldo persediaan Puslit Limnologi-LIPI pada akhir periode 2012 sebesar Rp19.512.150,00 dengan mutasi persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp	28.389.650
Mutasi tambah:		
- pembelian	Rp	1.087.334.816
Mutasi kurang:		
- Habis pakai	Rp	(1.096.212.316)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp	19.512.150

Mekanisme tersajinya persediaan dalam Neraca dilakukan dengan caramelakukan pencatatan, pengukuran dan penghitungan fisik persediaan tersebut per 31 Desember 2012. Jumlah tersebut berasal dari saldo persediaan tahun 2011 sebesar Rp 28.389.650,00 kemudian ditambah mutasi tambah dari pembelian selama tahun 2012 sebesar Rp 1.087.334.816,00, lalu dikurangi penggunaan selama tahun 2012 sebesar Rp 1.096.212.316,00, sehingga pada tanggal 31 Desember 2012 persediaan Puslit Limnologi-LIPI bersaldo sebesar Rp 19.512.150,00 yang terdiri dari Barang Konsumsi sebesar Rp 18.514.150 dan Barang Baku sebesar Rp 998.000,00. Agar tersaji saldo persediaan dalam Neraca maka harus dilakukan Rekonsiliasi antara Aplikasi SIMAK-BMN dengan Aplikasi SAI. Persediaan tersaji dalam Neraca dengan akun Persediaan pada debet dan Cadangan Persediaan pada kredit. Data Persediaan dari Tahun 2008 s.d. 2012 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rincian Persediaan

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2008
Persediaan	19.512.150	28.389.650	11.623.100	1.876.000	336.250

Sumber : Puslit Limnologi-LIPI

Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun Persediaan dapat disimpulkan bahwa :

- Tersajinya persediaan dalam Neraca adalah dengan dengan melakukan rekonsiliasi antara Aplikasi SIMAK-BMN dengan Aplikasi SAK, hal ini mengindikasikan bahwa Puslit Limnologi-LIPI sudah melakukan pencatatan, pengukuran dan penilaian terhadap persediaan.
- Rincian Persediaan yang tersaji dalam Tabel 8 mengasumsikan bahwa Puslit Limnologi-LIPI secara bertahap dari 2008 s.d 2012 sudah melakukan pengakuan akrual terhadap persediaan, hal ini terbukti dengan kenaikan yang signifikan atas saldo persediaan pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

4. Aset Tetap

Aset Tetap sebagai salah satu komponen aset yang memiliki nilai terbesar, sehingga mendapatkan penekanan dalam peraturan perundangundangan. Kesalahan pengakuan dan pengukuran akan berdampak pada Opini BPK atas Laporan Keuangan. Pada akhir periode

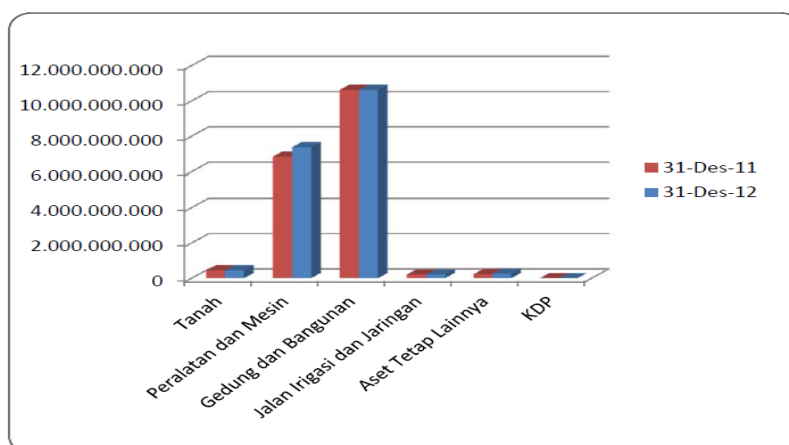
2012 Puslit Limnologi-LIPI memiliki saldo Aset sebesar Rp 18.894.906.732,00. Menurut sifat dan fungsinya Aset Tetap Puslit Limnologi-LIPI terdiri atas : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan bangunan; Jalan irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Aset Tetap dapat terlihat pada Tabel 9 dan Gambar 4.

Tabel 9. Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1	Tanah	Rp 442.340.000	Rp 442.340.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 7.373.897.732	Rp 6.844.437.232
3	Gedung dan Bangunan	Rp 10.624.414.000	Rp10.624.414.000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 205.405.000	Rp 205.405.000
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 248.850.000	Rp 228.952.000
6	KDP	Rp 0	Rp 0
	Jumlah	Rp 18.894.906.732	Rp 18.345.548.232

Sumber: Puslit Limnologi-LIPI

Gambar 4. Posisi Aset Tetap



Sumber: Puslit Limnologi-LIPI

Dalam PSAP 07 SAP, Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset dapat diperoleh oleh Pemerintah melalui berbagai cara, seperti pembelian, pertukaran, hibah/donasi, dll. Berdasarkan Table 9 tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2012 terjadi perubahan nilai aset yaitu pada aset Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya. Aset lainnya seperti Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan Irigasi dan Jaringan tidak mengalami perubahan. Kenaikan terjadi pada aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal untuk pengadaan peralatan untuk aktivitas penelitian, dan pada Aset Tetap Lainnya, yang berasal dari Belanja Modal untuk pengadaan Buku Perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan (Field Research) dalam rangka pengumpulan data-data, dapat dijelaskan bahwa :

□ Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa tanah yang dimiliki Kantor Pusat Penelitian Limnologi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 442.340.000,00 dan Rp 442.340.000,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap tanah yang dimiliki oleh Kantor Pusat Penelitian Limnologi selama tahun 2012.

□ Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Kantor Pusat Penelitian Limnologi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 7.373.897.732,00 dan Rp 6.844.437.232,00. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011	6,844,437,232
Mutasi tambah:	
- Penambahan saldo awal	170,520,000
- Pembelian	273,148,500
- Transfer masuk	123,423,000
- Reklasifikasi masuk	25,000,000
- Pengembangan nilai aset	17,787,000
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi keluar	(25,000,000)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(17,787,000)
- Penghentian aset dari penggunaan	(37,631,000)
Saldo per 31 Desember 2012	7,373,897,732

Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Kantor Pusat Penelitian Limnologi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 10.624.414.000,00 dan Rp 10.624.414.000,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Kantor Pusat Penelitian Limnologi selama tahun 2012.

□ Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Pusat Penelitian Limnologi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 205.405.000,00 dan Rp 205.405.000,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap jalan jaringan, dan irigasi yang dimiliki oleh Kantor Pusat Penelitian Limnologi selama tahun 2012.

□ Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Puslit Limnologi per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 248.850.000,00 dan Rp 228.952.000,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2012 keseluruhannya berasal dari pembelian koleksi buku perpustakaan senilai Rp 19.898.000,00.

□ Nilai aset tetap yang tersaji dalam Neraca berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dimiliki Puslit Limnologi per 31 Desember 2012 sebesar Rp 0,00, artinya tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Puslit Limnologi-LIPI selama tahun 2012. Mekanisme pencatatan Aset Tetap dalam Basis CTA memerlukan jurnal korektori. Ketika terjadi belanja modal, maka 2 jurnal harus disajikan untuk bisa memunculkan pengaruh transaksi berbasis kas tersebut kepada nilai aset tetap di Neraca. Oleh karena itu muncul akun EDI-Diinvestasikan Pada Aset Tetap sebagai kontra atas penambahan nilai Aset Tetap pada debit.

Aset Tetap tersaji dalam Neraca dengan sebelumnya melakukan Rekonsiliasi antara Aplikasi SIMAK-BMN dengan Aplikasi SAKPA. Salah satu hal yang berkaitan dengan pengakuan Aset Tetap adalah pengakuan penyusutan Aset Tetap. Penyusutan Aset Tetap diatur oleh PSAP 07 paragraf 53-57 dalam SAP berbasis CTA, kecuali tanah dan KDP, Aset Tetap hanya dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing, mengingat bahwa suatu aset tetap yang terus menerus

digunakan tentunya akan mengalami penurunan nilai kapasitas dan manfaat. Pengakuan penyusutan tidak menimbulkan kas keluar, tapi tetap diakui sebagai beban yang mengurangi nilai aset tetap dalam Neraca. Puslit Limnologi sampai dengan tahun 2012 belum melaksanakan Penyusutan terhadap Aset Tetap sampai dengan tahun 2012. Hal ini

disebabkan oleh belum adanya peraturan yang detil dan belum ditentukannya/ditetapkannya umur manfaat ekonomi Aset Tetap yang dimiliki. Namun pada tahun 2013 Puslit Limnologi sudah melaksanakan penyusutan. Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun Aset Tetap dapat disimpulkan bahwa :

- Tersajinya Aset Tetap di Neraca mengindikasikan bahwa Puslit Limnologi-LIPI sudah melakukan pencatatan, pengukuran dan penilaian terhadap Aset Tetap.
- Dalam basis akrual, penambahan nilai aset tetap tidak hanya dapat berasal dari perolehan dengan keluarnya kas/pembelian, hibah/donasi, melainkan dapat diperoleh juga dari penambahan nilai ketika ada revaluasi nilai aset tetap yang bersangkutan.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul atas hak barang/jasa yang diterima oleh Puslit Limnologi-LIPI namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai/pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa. Pengakuan utang yang dilakukan Puslit Limnologi-LIPI tidak dilakukan secara langsung berdasarkan transaksi tetapi melalui penyesuaian yang secara terpisah menyatakan pengakuan utang dan pengurangan Ekuitas Dana. Nilai yang digunakan sebagai pengukuran dan pencatatan kewajiban pada umumnya adalah nilai nominal. Jumlah Kewajiban Puslit Limnologi-LIPI yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 601.205.809,00.

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa nilai Kewajiban Puslit Limnologi-LIPI yang tersaji dalam Neraca sebesar Rp 601.205.809,00 tersebut terdiri dari : (1) Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp341.297.459,00 terdiri dari Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Rp 333.303.959,00 dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Rp 7.983.500,00; (2) Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 259.918.350,00 yang merupakan kewajiban Puslit Limnologi-LIPI untuk menyetorkan ke KUN. Daftar Penyajian dan Pengungkapan Utang periode 2012 bisa dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Penyajian dan Pengungkapan Utang

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	333.303.959	SK kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional
2.	Belanja Langganan Daya dan Jasa	7.983.500	Tagihan PAM
3.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	259.918.350	Bukti setor SSBP
	Jumlah	601.205.809	

Sumber: Puslit Limnologi-LIPI

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Utang Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang PFK, Bagian Lancar Utang jangka Panjang, Utang Bunga, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Kepada Pihak Ketiga antara lain :

1) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat

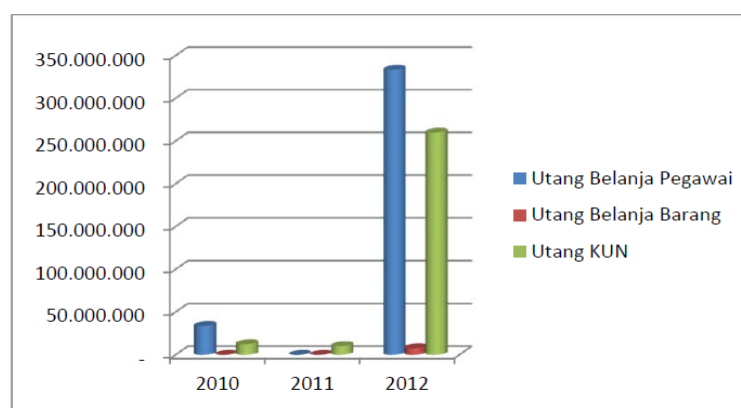
penyusunan laporan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Dokumen sumber yang terkait adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai atau Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai.

2) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang sifatnya nonfisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan pengeluaran jasa nonfisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan/realisasi atas hak/ perjanjian/ komitmen tersebut. Dokumen sumber yang terkait berupa : tagihan dari penyedia barang/jasa; SK Pembentukan Tim; Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa; dan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan akun kewajiban pada Puslit Limnologi- LIPI maka dapat dijelaskan bahwa :

□ Pada tahun 2010 kewajiban terdiri dari Utang Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp 33.665.386,00 dan Pendapatan yang belum disetorkan ke KUN sebesar Rp 12.673.500,00. □ Pada tahun 2011 kewajiban meliputi Pendapatan yang belum disetor ke KUN sebesar Rp 10.147.000,00.

□ Pada tahun 2012 kewajiban terdiri dari : Utang Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar Rp 333.303.959,00; Utang Belanja Barang yang Masih harus Dibayar Rp 7.983.500,00; dan Pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Negara atau Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp 259.918.350,00. Penyajian Utang pada Pihak Ketiga pada Neraca Tahun Anggaran 2010-2012 dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Utang pada Pihak Ketiga TA 2010-2012



Sumber: Puslit Limnologi-LIPI

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Puslit Limnologi-LIPI sudah melaksanakan penerapan basis akrual pada akun kewajiban, hal ini terlihat dalam Gambar 5, tahun 2012 menggambarkan bahwa kesadaran untuk melakukan penghitungan-

penghitungan terhadap belanja yang masih harus dibayar semakin tinggi hal ini disesuaikan atas dasar pengalaman bahwa kewajiban setiap tahun pasti ada. Pada basis CTA menyebabkan timbulnya akun kewajiban, sehingga harus mencatat setiap transaksi sesuai terjadinya walaupun kas belum dikeluarkan. Mekanisme pencatatan Kewajiban dalam basis CTA ini yaitu dengan cara melakukan identifikasi seluruh kewajiban, kemudian melakukan penghitungan berapa kewajiban yang masih harus dibayar pada periode berikutnya atas beban pada periode berjalan, setelah semua kewajiban teridentifikasi maka dilakukanlah penyesuaian berdasarkan masing-masing akun. Setelah dilakukan penyesuaian akhirnya kewajiban tersaji dalam Neraca. Penerapan basis Kas Modifikasi terkait dengan akun Kewajiban dapat disimpulkan bahwa :

□ Puslit Limnologi-LIPI sudah melaksanakan penerapan basis akrual pada akun kewajiban, hal ini terlihat dalam Gambar 5 yang mengasumsikan bahwa sudah adanya kesadaran untuk melakukan penghitungan-penghitungan terhadap belanja yang masih harus dibayar semakin tinggi hal ini disesuaikan atas dasar pengalaman bahwa kewajiban setiap tahun pasti ada.

□ Penerapan penerapan akrual pada akun Kewajiban masih terasa sulit dilaksanakan oleh Puslit Limnologi-LIPI disebabkan masalah birokrasi yang melibatkan pihak lain/institusi lain. Hal ini terbukti adanya kesalahan pengakuan pada tahun 2012, dari analisa yang dilakukan terhadap pencatatan pada bulan tahun 2013, ditemukan adanya pembayaran atas belanja listrik dan telpon untuk tagihan bulan Desember 2012. Tagihan listrik sebesar Rp 18.104.550,00 dan tagihan telpon sebesar Rp 4.107.317,00. Kedua tagihan tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga yang sudah dibuat, sehingga kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2012 tersaji dengan nilai yang tidak semestinya. Pengakuan kewajiban/utang agar tersaji dalam neraca adalah dengan cara melakukan penyesuaian atas setiap pos-pos dengan akun masing-masing. Jurnal yang digunakan diantaranya adalah :

- 1) Utang sebesar Rp 7.983.500,00 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (D) pada Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek (K)
- 2) Utang sebesar Rp 333.303.959,00 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (D) pada Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (K)
- 3) Utang sebesar Rp 259.918.350,00 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (D) pada Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (K).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapatlah disajikan neraca tahun 2012 yang sudah disesuaikan dengan beberapa pos-pos akrual yang seharusnya tersaji dalam Neraca 2012. Sebagai bahan perbandingan dengan Neraca Puslit Limnologi per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

NAMA PERKIRAAN	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0	Rp 0
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0	Rp 0
Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 259.918.350	Rp 10.147.000
Jumlah Kas dan Bank	Rp 259.918.350	Rp 10.147.000
Piutang		
Piutang Bukan Pajak	Rp 52.710.000	Rp 0
Jumlah Piutang (Bersih)	Rp 52.710.000	Rp 0
Persediaan	Rp 19.512.150	Rp 28.389.650
Jumlah Aset Lancar	Rp 332.140.500	Rp 38.536.650
Aset Tetap		
Tanah	Rp 442.340.000	Rp 442.340.000
Peralatan dan Mesin	Rp 7.373.897.732	Rp 6.844.437.232
Gedung dan Bangunan	Rp 10.624.414.000	Rp 10.624.414.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 205.405.000	Rp 205.405.000
Aset Tetap Lainnya	Rp 248.850.000	Rp 228.952.000
KDP	Rp 0	Rp 0
Jumlah Aset Tetap	Rp 18.894.906.732	Rp 18.345.548.232
Piutang Jangka Panjang		
Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	Rp 0	Rp 0
Aset Lain-Lain	Rp 0	Rp 347.630.000
Jumlah Aset Lainnya	Rp 0	Rp 347.630.000
JUMLAH ASET	Rp 19.227.047.232	Rp 18.731.714.882
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 363.499.326	Rp 0
Uang Muka dari KPPN	Rp 0	Rp 0
Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp 259.918.350	Rp 10.147.000
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 623.417.676	Rp 10.147.000
JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 623.417.676	Rp 10.147.000
EKUITAS DANA		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	Rp 52.710.000	Rp 0
Cadangan Persediaan	Rp 19.512.150	Rp 28.389.650
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp (363.499.326)	Rp 0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Rp (291.277.176)	Rp 28.389.650
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp 18.894.906.732	Rp 18.345.548.232
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp 0	Rp 347.630.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	Rp 18.894.906.732	Rp 18.693.178.232
JUMLAH EKUITAS DANA	Rp 18.603.629.556	Rp 18.721.567.882
JMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp 19.227.047.232	Rp 18.731.714.882

Sumber : Puslit Linnologi-LIPI

Gambar 11 Neraca

C. Dampak Dalam Penerapan Basis CTA

Penggunaan basis CTA yang bersifat setengah kas dan setengah akrual akan memberikan dampak. Beberapa dampak dalam penerapan CTA terkait akun-akun akrual, antara lain :

1. Dalam Pengakuan Kas

Pada basis Kas Modifikasi ada ketentuan masih dibukanya pembukuan pada akhir periode, sehingga jika terdapat saldo kas pada Bendahara Pengeluaran tertanggal 31 Desember yang berasal dari belanja yang tidak terealisasi dan belum disetorkan saldo kas tersebut ke Kas Negara, maka harus diakui dalam Neraca periode tersebut walaupun sudah masuk ke tahun berikutnya. Saldo kas supaya tersaji dalam neraca, maka harus melakukan penyesuaian masing-masing akun, kemudian di posting ke dalam Buku Besar, sehingga menjadi Jumlah Saldo Penyesuaian. Setelah penyesuaian selesai dibuat maka tersaji di dalam Neraca, dengan jurnal Kas Lainnya dan Setara Kas dengan akun penyeimbangannya Pendapatan Yang Ditangguhkan. Ini gambaran ketidakkonsistenan basis CTA, sehingga menimbulkan perbedaan antara LRA dan Neraca.

Dampak dari pengakuan saldo kas tersebut adalah karena LRA berbasis kas dan sudah melakukan tutup buku sehingga pengembalian belanja tidak mengurangi realisasi belanja pada LRA, akhirnya realisasi belanja pada LRA tidak sama dengan yang sebenarnya.

2. Dalam Pengakuan Piutang dan Kewajiban

Pada basis CTA pengakuan piutang hanya dilakukan dengan cara mendebet Piutang yang bersangkutan dan mengkredit Cadangan Piutang, sama sekali tidak ada pengakuan pendapatan sebagai akibat adanya pengakuan piutang, sehingga dampaknya LRA yang sudah disetujui DPR/DPRD sama sekali tidak memasukkan unsur pendapatan tersebut. Dampak dari basis CTA dalam hal pengakuan kewajiban/utang adalah karena basis CTA tidak memberi motivasi suatu entitas untuk secepat mungkin mengidentifikasi dan menghitung jumlah Utang yang harus dibayar kepada Pihak Ketiga, sehingga bisa saja terjadi kesalahan tidak tersaji dalam neraca karena belum dilakukannya penghitungan pada akhir periode atau sudah tersaji dalam neraca tapi dengan nilai yang tidak semestinya. Pengakuan Utang/kewajiban memang terasa sulit bagi Puslit Limnologi-LIPI mengingat beberapa hal antara lain: keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya; dan melibatkan pihak lain/institusi lain, maka menyebabkan kesulitan dalam penghitungan kewajiban. Dampak dari pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga tersebut adalah karena LRA berbasis kas dan sudah melakukan tutup buku sehingga Belanja-belanja yang masih harus dibayar tidak menambah realisasi belanja pada LRA, akhirnya realisasi belanja pada LRA tidak sama dengan yang sebenarnya.

3. Dalam Pengakuan Aset Tetap, dan Penyusutan Pada basis CTA berdampak terjadinya perbedaan antara penambahan Aset Tetap dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mutasi aset tetap dari transfer masuk, reklasifikasi, dan pengembangan nilai aset tetap; atau karena pengklasifikasian belanja yang membingungkan antara belanja modal dengan belanja barang, hal ini biasanya terjadi pada perolehan peralatan yang sekiranya berbentuk kecil. Dampak lainnya dari basis CTA terhadap Aset Tetap adalah bisa terjadi kesalahan pengakuan aset tetap yang berbeda antara LRA dengan Neraca. Di dalam LRA ada aset yang berasal dari Belanja Modal, sedangkan di Neraca diakui sebagai Belanja Barang, hal ini disebabkan adanya pengadaan aset tetap dari Belanja Modal tetapi diakui sebagai Belanja Barang, atau sebaliknya aset diperoleh dari belanja barang pemeliharaan, tapi karena menambah nilai aset sehingga diakui menjadi aset, timbul perbedaan perolehan aset di LRA dengan di Neraca. Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, diatur bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, Aset Tetap disajikan dengan penyesuaian pada Aset Tetap dan Diinvestasikan pada Aset Tetap. Namun pada praktiknya belum ada peraturan-peraturan yang detil dalam pengukuran dan penghitungan penyusutan Aset Tetap tersebut yang diberlakukan pada Pemerintah, sehingga berdampak banyak entitas yang belum melakukan perhitungan penyusutan.

D. Langkah-Langkah Dalam Penerapan Basis Akrual Penuh

Penerapan Basis Akrual penuh pada Pemerintahan Indonesia harus dilaksanakan tahun 2015. Namun pada kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentang standar akuntansi akrual telah diterbitkan. Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan langkah-langkah upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Langkah-langkah tersebut meliputi cara-cara dalam penerapan akuntansi akrual dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menerapkan Pengeluaran sesuai Estimasi Pengeluaran Pada akhir tahun ketika terdapat saldo di kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Belanja Uang Makan Pegawai yang tidak terserap 100%. Solusinya adalah ketika bulan November harus dibuatkan Estimasi Pengeluaran dengan perhitungan yang detil untuk bulan Desember sehingga pada akhir tahun sudah dapat memprediksi belanja yang akan dibayar, sehingga tidak terlalu banyak yang tidak terserap. Cara lain yang berhubungan dengan Rekap Daftar Absensi Pegawai untuk dasar pembayaran Uang Makan Pegawai bulan Desember dibutuhkan suatuaplikasi yang dapat menghitung secara cepat, sehingga pada tanggal 31 Desember sudah dapat diketahui berapa dana yang tidak terserap dan segera disetorkan. Jika saldo kas di bendahara pengeluaran terlalu besar, hal ini menggambarkan lemahnya kontrol atas pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran.

2. Rekonsiliasi dan Validasi Aset Tetap

Dalam penerapan dalam basis akrual, terkait dengan penyajian aset tetap pada Neraca, bisa saja berbeda dengan belanja modal yang ada pada LRA. Agar sama maka harus melakukan :

- a. Harus melakukan Rekonsiliasi antara data keuangan (yang terdapat pada aplikasi SAI) dengan data BMN (yang terdapat pada aplikasi SIMAK-BMN).
- b. Harus melakukan Validasi Aset Tetap di Neraca. Validasi dilakukan dengan cara: (1) Membandingkan jumlah aset dalam Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel dengan jumlah aset tetap dalam neraca. Jumlah aset tetap dalam laporan BMN harus sama dengan jumlah aset tetap yang ada di Neraca; dan (2) Membandingkan antara pertambahan aset tetap dalam neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam LRA. Jika terjadi perbedaan yaitu jumlah aset tetap di Neraca yaitu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aset tetap di LRA, maka harus dilakukan jurnal penyesuaian. Perbedaan disebabkan adanya pengadaan aset tetap dari Belanja Modal tetapi diakui sebagai Belanja Barang.

3. Pengakuan Penyusutan Aset tetap

Pada basis CTA, penyusutan aset tetap bahwa penyusutan sudah harus diakui, tetapi karena peraturan untuk pengukuran dan pengakuannya belum jelas, maka pada tahun 2012 Puslit Limnologi-LIPI belum mengakui penyusutan dalam laporan keuangan. Pada tahun 2012, Puslit Limnologi-LIPI sudah melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimilikinya.

4. Pengidentifikasi dan Pengakuan Utang PFK

Penerapan konsep akrual terkait dengan kewajiban/utang kepada pegawai dalam hal pengakuan utang, bisa terjadi kesalahan tidak tersaji dalam neraca atau tersaji dalam neraca tapi nilainya tidak sesuai, agar tidak terjadi kesalahan atau sudah bisa diakui dalam neraca utang tersebut pada akhir periode, maka sebelum periode berakhir sudah dilakukan identifikasi dan penghitungan berapa utang yang belum dibayar kepada pegawai atas dasar Dokumen Mutasi terkait (SK-SK).

Penghitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Gaji yang sudah tersedia. Masing-masing data diinput dalam aplikasi, setelah proses penginputan selesai maka akan terrekap dalam Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai (Kekurangan Gaji Pegawai) berapa jumlah seluruhnya gaji yang masih harus dibayar atau yang menjadi utang pada akhir periode. Kesalahan bisa juga terjadi ketika adanya tagihan dari pihak ketiga yang diakui sebagai Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar, misalnya saja tagihan telpon, listrik, dan air. Agar tidak terjadi kesalahan pada pembuatan laporan keuangan atau data utang tersaji dengan nilai yang sesungguhnya di neraca sebaiknya pada tanggal 31

Desember sudah dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga sehingga tidak menimbulkan utang, walaupun harus tetap melewati periode tersebut, maka padaakhir periode harus dikomunikasikan ke pihak ketiga tersebut berapa tagihan yang harus dibayar atas penggunaan barang/jasa sampai dengan bulan Desember 2012.

Pada akhir tahun anggaran dalam rangka menginformasikan adanya tambahan belanja akrual dari belanja yang masih harus dibayar berupa Utang Kepada Pihak Ketiga atau Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) maka disajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual yang dilengkapi dengan LRA menurut Basis akrual. LRA ini dibuat untuk mengakomodir akun-akun akrual yang tidak masuk pada LRA berbasis kas. LRA menurut basis akrual dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. LRA Menurut Basis Akrual

Pendapatan/Belanja	Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Basis Akrual
		Tambah	Kurang	
A Pendapatan Negara dan Hibah				
I Penerimaan Perpajakan				
II Penerimaan Negara Bukan Pajak				
III Penerimaan Hibah				
B Belanja Negara	5.332.624.619	341.287.459	-	5.673.912.078
I. Belanja Pemerintah Pusat	5.332.624.619	341.287.459	-	5.673.912.078
1. Belanja Pegawai	5.239.440.219	333.303.959	-	5.572.744.178
2. Belanja Barang	93.184.400	7.983.500	-	101.167.900
3. Belanja Modal				
II. Transfer ke Daerah				
JUMLAH BELANJA NEGARA	5.332.624.619	341.287.459	-	5.673.912.078

Sumber: Puslit Limnologi

Laporan Realisasi Anggaran menurut Basis Akrual adalah laporan yang menggabungkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual (ditambah/dikurangi), sehingga tersaji Informasi Akrual tersebut. LRA ini disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai lampiran.

5. Kondisi Yang Mendukung

Penerapan basis akrual penuh yaitu pada tahun 2015, diperlukan juga kondisi-kondisi yang mendukung, antara lain :

a. Komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan.

Dukungan para pengambil keputusan, merupakan hal yang terpenting karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama.

b. Sosialisasi dan Pelatihan :

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi. Karena adanya resistensi pihak internal terhadap perubahan ke arah

sistem akuntansi berbasis akrual maka diperlukan Sosialisasi dan Pelatihan yang berjenjang meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan skill pelaksana, membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua pihak.

c. Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional.

Penyiapan dan penyusunan Laporan Keuangan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

d. Adanya dukungan dari pengawas Internal/Eksternal, karena perubahan basis akuntansi diharapkan akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas Internal/Eksternal.

e. Tersedianya Sistem Teknologi Informasi, berupa aplikasi-aplikasi Keuangan yang mampu mengakomodir persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

III. KESIMPULAN

Penerapan basis akrual bukanlah hal yang mudah dilaksanakan di Indonesia, untuk itu pemerintah memutuskan untuk mengadopsi basis akrual secara bertahap, hal ini dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP tersebut akuntansi pemerintah menggunakan akuntansi berbasis Kas Modifikasi (Cash Toward Accrual/CTA) artinya penggunaan basis kas pada LRA untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan penggunaan basis akrual pada Neraca untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Setelah melihat data-data Laporan Keuangan Puslit Limnologi-LIPI dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari beberapa pihak terkait, maka dapatlah suatu gambaran seperti yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Akrual Pada Neraca

Puslit Limnologi-LIPI sudah melakukan pencatatan, pengakuan dan penyajian akun-akun akrual dalam Neraca.

a. Pengakuan Kas

Pada akhir periode 2012 Puslit Limnologi-LIPI tidak memiliki kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat saldo kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan Pengembalian Belanja yang belum disetorkan pada tanggal 31 Desember 2012. Namun Puslit Limnologi-LIPI sudah melaksanakan pencatatan dan pengakuan terhadap akun akrual tersebut, sehingga diakui dan disajikan dalam Neraca, kas sebesar Rp 259.918.350,00, melalui proses penyesuaian.

b. Pengakuan Piutang dan Utang

Dari hasil analisis dinyatakan bahwa penerapan akrual terkait dengan pengakuan piutang dan utang masih sulit dilaksanakan oleh Puslit Limnologi-LIPI, terbukti masih adanya pos-pos yang belum diakui pada periode 2012. Penyajian Piutang dalam Neraca adalah Piutang (pada debet) dengan akun penyeimbangannya yaitu Cadangan Piutang (pada kredit). Sedangkan Utang tersaji di Neraca adalah Utang Kepada Pihak Ketiga bagian dari Kewajiban dengan

akun penyeimbangannya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Membayar Utang Jangka Pendek

c. Persediaan

Dalam hal akun persediaan, pada akhir tahun 2012 Puslit Limnologi-LIPI sudah melaksanakan pengakuan dan pengukuran. Persediaan yang disajikan dalam neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik di lapangan dan pengukuran yang dicatat dan disajikan sebesarbiaya perolehannya. Piutang tersaji di Neraca sebagai bagian dari asset lancar dengan akun penyeimbangannya Cadangan Persediaan yang berada di bagian Ekuitas Dana Lancar (EDL). Puslit Limnologi-LIPI sudah melaksanakan pencatatan dan pengakuan terhadap akun persediaan, sehingga persediaan tersaji dalam Neraca sebesar Rp19.512.150,00 melalui proses rekonsiliasi antara aplikasi SIMAKBMN dengan aplikasi SAK

d. Aset Tetap

Dalam penyajian Aset Tetap, Puslit Limnologi-LIPI sudah melaksanakan Rekonsiliasi antara data keuangan dengan data BMN dan melaksanakan Validasi Aset Tetap di Neraca sehingga jumlah aset tetap dalam laporan BMN sudah sama dengan jumlah aset tetap yang ada di Neraca. Aset tetap Puslit Limnologi-LIPI diakui dalam neraca sebesar Rp 18.894.906.732,00, melalui proses rekonsiliasi antara aplikasi SIMAK-BMN dengan aplikasi SAK.

e. Penyusutan Aset Tetap

Dalam hal pengakuan Penyusutan Aset tetap, Puslit Limnologi-LIPI sampai dengan tahun 2012 belum melakukan penyusutan, namun pada tahun 2013 sudah mulai melakukan penghitungan penyusutan.

2. Dampak Dalam Penerapan CTA

Pada praktiknya basis Kas Modifikasi/CTA kurang mendapat dukungan, hal ini tidak menjadi mustahil kalau dalam praktiknya terdapat pos-pos akrual di neraca yang kemungkinan tidak tercatat dengan semestinya. Beberapa dampak dalam penerapan CTA antara lain:

- a. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang masih menggunakan basis kas, kemungkinan timbul informasi tidak relevan dan akuntabelatas LRA tersebut.
 - 1) Pengakuan saldo kas tidak mengurangi realisasi belanja di LRA.
 - 2) Pengakuan utang tidak menambah realisasi belanja di LRA
 - 3) Pengakuan aset tetap adalah bisa terjadi kesalahan pengakuan assettetap yang berbeda antara LRA dengan Neraca, di dalam LRA ada belanja aset yang berasal dari Belanja Modal, sedangkan diNeraca diakui sebagai Belanja Barang, atau sebaliknya di LRA diakui belanja barang namun di Neraca diakui sebagai belanja modal.

3. Langkah-langkah yang untuk menghadapi basis akrual penuh Langkah yang dilakukan dalam menghadapi penerapan basis akrual penuh tahun 2015 adalah:

- a. Menerapkan Estimasi Pengeluaran pada bulan November, untuk menghitung perkiraan pengeluaran bulan Desember, sehingga ketika akhir periode sudah bisa diprediksi belanja apa saja yang bisa diakui sebagai pengeluaran periode tersebut.
- b. Terkait dengan penyajian aset tetap pada Neraca bisa saja berbeda dengan belanja modal yang ada pada LRA, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara petugas SAKPA dengan petugas SIMAK- BMN.
- c. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Institusi yang terkait sehingga sebelum periode berakhir sudah bisa dilakukan pengidentifikasian, penghitungan dan pengukuran atas piutang dan utang.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Ahrens, J. 2008. Overcoming the subjective-objective divide in interpretive Ankarath, N., dkk. Memahami IFRS : Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Indeks. 2012.

Bakar, Abu. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. 2013.

Baridwan, Zaki. Intermediate Accounting. BPFE-Jogyakarta, Yogyakarta. 2010.

Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta. 2010.

Halim Abdul, Kusufi. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan daerah. Salemba Empat. Jakarta. 2012.

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogyakarta. 2009.

Modul Pelatihan: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Jakarta. 2004.

Nordiawan, D. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. 2006.

Nordiawan, D., Putra, I.S., Rahmawati, M. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta. 2012.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 : Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 : Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 : Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 : Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI pada Laporan Keuangan

Reeve, J.M., et all. Principles of Accounting-Indonesia Adaftation. Salemba Empat. Jakarta. 2009.

Rudianto. Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Airlangga, Jakarta. 2009.

Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat. Jakarta. 2009.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 tahun 2004 : Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 : Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Yusup, Al. Haryono. Dasar-dasar Akuntansi. STIE YKPN. Yogyakarta. 2011.
Kepmendagri No. 29 tahun 2002 : Kebijakan Akuntansi

M. Imam Sundarta dan Ester Rosita dari Fakultas Ekonomi
Univesitas Ibn Khaldun